

Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Implementasi Manajemen

Desi Nurhikmahyanti

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah artikel:

Diterima, Agt 12, 2024
Revisi, Okt 10, 2024
Disetujui, Okt 13, 2024

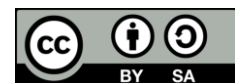
Kata Kunci:

Sumber Daya,
Pengadaan Barang/Jasa,
Daya Saing,
Kebijakan,
Implementasi Manajemen.

ABSTRAK

Strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Strategi ini tidak hanya melibatkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan, tetapi juga mencakup aspek kebijakan dan implementasi manajemen yang harus diperhatikan dengan seksama. Hubungan antara kebijakan dan implementasi manajemen dalam konteks pengadaan menjadi faktor penentu yang mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas suatu negara dalam mengelola sumber daya pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan daya saing Indonesia dengan fokus pada tinjauan terhadap kebijakan dan implementasi manajemen yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, memungkinkan analisis mendalam tentang kerangka kebijakan, proses pengadaan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen yang efektif, termasuk penguatan sumber daya manusia, peningkatan transparansi, dan kerjasama antara sektor publik dan swasta, memiliki dampak positif terhadap daya saing pengadaan Indonesia. Strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa di Indonesia harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan, manajemen, dan kolaborasi. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih baik dan lebih kompetitif. Implikasi penelitian ini meliputi perlunya perbaikan dalam kebijakan dan praktik pengadaan, peningkatan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan kerjasama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan daya saing pengadaan Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi Penulis:

Desi Nurhikmahyanti,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Tidar,
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Email: desinurhikmahyanti@untidar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terus mengalami perkembangan secara dinamis. Seiring berkembangnya negara tentu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menghadapi era globalisasi. Salah satu pilar penting yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan inovasi adalah pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, pengadaan semakin

penting sebagai wujud dalam peran strategi kebijakan dan implementasi manajemen. Sebagaimana dinyatakan oleh Yunus (2019) bahwa pengadaan barang dan jasa tidak hanya sebagai transaksi saja, namun sebuah keputusan yang dapat mengubah nasib bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, daya saing sebuah negara tidak hanya bergantung pada potensi alamnya, juga pada kemampuan dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, strategi pengembangan sumber daya pengadaan menjadi krusial untuk memastikan bahwa sebuah negara dapat bersaing secara efektif di pasar global.

Menurut Porter (1990) menyatakan bahwa daya saing suatu bangsa tidak hanya terletak pada kekayaan alamnya saja, tetapi pada kemampuan bangsa untuk mengelola dan mengembangkan faktor produksi termasuk pengadaan barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut, Sachs (2017) seorang ahli ekonomi menjelaskan bahwa peningkatan daya saing suatu negara tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi juga terletak pada bagaimana negara tersebut melakukan pengelolaan sumber daya yang ada secara efektif, terutama pada pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan yang mendalam terhadap kebijakan dan implementasi, serta strategi manajemen yang diadopsi dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Analisis kritis perlu dilakukan untuk membentuk pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana Indonesia mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa agar daya saing Indonesia di pasar global dapat meningkat. Dalam menanggapi tantangan global dan dinamika ekonomi, pengadaan barang dan jasa menjadi aspek penting dalam membentuk daya saing suatu negara. Hubungan antara kebijakan dan implementasi manajemen dalam konteks pengadaan menjadi faktor penentu yang mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas suatu negara dalam mengelola sumber daya tersebut.

Sebuah studi oleh PwC menggarisbawahi pentingnya hubungan erat antara kebijakan dan implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa. Implementasi yang sukses memerlukan landasan kebijakan yang kuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengadaan. Dengan demikian, artikel ini akan merinci bagaimana kebijakan dan implementasi manajemen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan nasional dalam meningkatkan daya saing.

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas 8 (delapan) yang dijabarkan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa
Memahami strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi proses pengadaan, sehingga waktu dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.
- b. Peningkatan daya saing nasional
Dengan menganalisis kebijakan dan implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat serta potensi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global.
- c. Pengembangan model terbaik
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model atau strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa yang terbaik sesuai dengan konteks Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahaan dan pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa.
- d. Penyusunan kebijakan yang tepat
Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan dan implementasi manajemen, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa.
- e. Optimalisasi penggunaan anggaran publik
Dengan mengevaluasi strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa, dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran publik, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
- f. Peningkatan kualitas layanan publik
Implementasi strategi yang efektif dalam pengadaan barang dan jasa dapat membawa pada peningkatan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

- g. Penyelarasan dengan standar internasional
Dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap kebijakan dan implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa, Indonesia dapat lebih baik menyelaraskan praktiknya dengan standar internasional, yang akan membuka peluang untuk kerja sama internasional yang lebih luas.
- h. Penyediaan data dan analisis yang komprehensif
Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data dan analisis yang komprehensif mengenai kondisi aktual, tantangan, dan peluang dalam pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa di Indonesia, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki implikasi yang luas dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia, yang pada akhirnya akan membawa manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi penggunaan sumber daya
Dengan menganalisis strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa, penelitian ini dapat membantu entitas publik dan swasta untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif, menghindari pemborosan dan memaksimalkan nilai dari setiap pengeluaran.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
Penelitian ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan memeriksa kebijakan dan implementasi manajemen yang ada. Ini akan membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan nepotisme serta memastikan bahwa keputusan pengadaan didasarkan pada kriteria yang jelas dan adil.
3. Penyediaan data pendukung keputusan yang solid
Dengan menyediakan analisis mendalam tentang kebijakan dan praktik pengadaan barang dan jasa, penelitian ini akan menyediakan data yang solid bagi pengambil keputusan di tingkat pemerintah dan perusahaan untuk merancang strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
4. Peningkatan kualitas barang dan jasa yang diperoleh
Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengadaan yang ada, penelitian ini akan membantu mendorong perbaikan dalam kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah dan perusahaan. Hal ini akan berdampak positif pada layanan publik dan kepuasan pelanggan.
5. Peningkatan daya saing global
Melalui pemahaman yang lebih baik tentang strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Ini akan membantu membuka peluang untuk ekspansi bisnis dan investasi asing, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
6. Peningkatan kepercayaan investor
Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, penelitian ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing. Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investasi jangka panjang.
7. Pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik
Melalui identifikasi praktik terbaik dalam pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan profesionalisme dan keterampilan dalam hal manajemen pengadaan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat jangka panjang bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
8. Pemberdayaan ekonomi lokal
Dengan memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa, terutama dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi pelaku usaha lokal, penelitian ini akan membantu dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Ini akan menciptakan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik, mengeksplorasi pemahaman dan persepsi dari perspektif partisipan, serta memberikan deskripsi yang mendetail tentang konteks dan proses yang terlibat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan observasi langsung terhadap praktik-praktik pengadaan barang dan jasa di lapangan.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan landasan yang penting dalam memahami bagaimana pengadaan barang dan jasa dapat ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM yang terlibat dalam proses tersebut. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan SDM untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan.

Menurut Purwati et al., (2021), pengembangan SDM adalah suatu proses yang berkelanjutan dan terencana untuk meningkatkan kemampuan karyawan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pembelajaran lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan SDM dalam konteks pengadaan barang dan jasa, organisasi dapat memastikan bahwa para profesional yang terlibat dalam proses tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Investasi dalam pengembangan SDM juga memberikan dampak jangka panjang bagi organisasi. SDM yang terus-menerus dilatih dan dikembangkan akan membawa peningkatan berkelanjutan dalam proses pengadaan, sehingga organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Dengan demikian, pengembangan SDM dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya meningkatkan performa operasional saat ini, tetapi juga mempersiapkan organisasi untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik.

Menurut Puluala (2021), pengembangan SDM adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan melalui berbagai metode seperti pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, pengembangan SDM menjadi krusial karena melibatkan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi, teknik negosiasi, evaluasi risiko, dan manajemen kontrak. Pengembangan SDM dalam pengadaan barang dan jasa juga berkaitan erat dengan pemahaman regulasi dan kebijakan pengadaan yang berlaku. Proses pengadaan yang sesuai dengan aturan hukum akan mengurangi risiko hukum dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. SDM yang terlatih dan berpengetahuan luas mengenai regulasi dapat menghindari potensi pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi atau penalti bagi organisasi. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai regulasi juga membantu dalam mengidentifikasi peluang-peluang efisiensi dan inovasi dalam proses pengadaan.

Pengembangan SDM dalam pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sangat krusial dalam menunjang efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, kebutuhan akan SDM yang kompeten dan terampil menjadi semakin mendesak. SDM yang handal mampu mengidentifikasi kebutuhan organisasi secara tepat, memilih pemasok yang berkualitas, serta mengelola kontrak dan hubungan dengan pemasok secara profesional. Dalam konteks ini, pengembangan SDM tidak hanya terkait dengan peningkatan keterampilan dan kompetensi individu, tetapi juga dalam membangun kapabilitas organisasi untuk mengelola proses pengadaan dengan efektif dan efisien (Alqudah et al., 2022). Penelitian dan teori dalam bidang ini menyoroti pentingnya investasi dalam pengembangan SDM sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu proses vital dalam operasi organisasi, baik itu perusahaan swasta maupun entitas publik. Dalam kajian pustaka ini, kami akan mengeksplorasi konsep dan praktik pengembangan SDM dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pentingnya pengembangan SDM, strategi yang dapat diterapkan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks ini (Alqudah et al., 2022).

Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa. SDM yang kompeten dan terampil dapat

memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Mousa & Othman (2020), pengembangan SDM merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan terencana untuk meningkatkan kemampuan karyawan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pembelajaran lainnya. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, pengembangan SDM menjadi penting karena proses tersebut melibatkan berbagai aspek teknis dan administratif yang memerlukan keahlian khusus.

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mengoptimalkan pengembangan SDM dalam pengadaan barang dan jasa, diperlukan penerapan strategi yang efektif. Menurut Masudin et al. (2020), ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Pelatihan dan pengembangan karyawan: memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan, baik itu terkait dengan regulasi pengadaan, teknik negosiasi, atau manajemen kontrak.
- b. Penggunaan teknologi: menerapkan teknologi informasi dan sistem manajemen yang modern untuk mempermudah proses pengadaan, memantau kinerja, dan meningkatkan efisiensi.
- c. Kemitraan dengan pihak eksternal: melibatkan pihak eksternal seperti lembaga pendidikan, konsultan, atau mitra bisnis untuk memberikan sumber daya tambahan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Meskipun pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa diakui, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi meliputi:

- a. Keterbatasan Anggaran: Pengembangan sumber daya manusia memerlukan investasi yang signifikan, namun keterbatasan anggaran mungkin menjadi hambatan dalam melaksanakan program pengembangan yang komprehensif.
- b. Perubahan Regulasi: Perubahan regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa dapat mempengaruhi kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan baru dan adaptasi terhadapnya diperlukan.

Sementara itu, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sumber daya manusia:

- a. Teknologi Pendukung: Kemajuan teknologi, seperti e-learning atau aplikasi manajemen pengadaan, dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program pengembangan sumber daya manusia.
- b. Kerjasama Industri-Akademisi: Kerjasama antara industri dengan lembaga pendidikan dapat meningkatkan relevansi program pelatihan dan pengembangan dengan kebutuhan pasar.

Manajemen strategis dalam pengadaan barang dan jasa

Teori manajemen strategis memberikan kerangka kerja konseptual untuk merumuskan dan menerapkan strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa yang efektif. Teori ini menekankan pentingnya keselarasan antara tujuan organisasi, lingkungan eksternal, dan kapabilitas internal dalam merancang strategi yang dapat meningkatkan daya saing. Johnson et al. (2014) mengatakan bahwa manajemen strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang organisasi, analisis lingkungan eksternal dan internal, pemilihan strategi yang tepat, dan implementasi strategi tersebut melalui alokasi sumber daya yang optimal. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan pengadaan, memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi tantangan, dan mengimplementasikan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing (Ahmed et al., 2023).

Hill and Jones (2013) menuturkan terkait manajemen strategis melibatkan proses analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi untuk merumuskan tujuan jangka panjang dan rencana aksi yang dapat mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, manajemen strategis membantu dalam mengidentifikasi peluang pasar, mengantisipasi ancaman, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan

organisasi. Manajemen strategis merupakan pendekatan yang penting dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, penerapan manajemen strategis memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan (Changalima et al., 2021).

Pendekatan Sistem dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Konsep sistem dalam pengadaan barang dan jasa menekankan pentingnya memahami hubungan antara elemen-elemen yang terlibat dalam proses pengadaan, termasuk pemasok, konsumen internal, dan proses operasional. Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis interaksi antar bagian-bagian tersebut dan merancang strategi yang koheren untuk mencapai tujuan organisasi.

Analisis lingkungan eksternal dalam pengadaan

Teori manajemen strategis menekankan pentingnya analisis lingkungan eksternal, termasuk tren pasar, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor politik dan ekonomi lainnya, dalam merumuskan strategi pengadaan yang efektif. Dengan memahami kondisi eksternal, organisasi dapat menyesuaikan strateginya untuk mengoptimalkan peluang dan mengurangi risiko dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengembangan strategi pengadaan

Teori manajemen strategis menawarkan pendekatan sistematis untuk mengembangkan strategi pengadaan yang efektif. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan organisasi, analisis pasar, pemilihan pemasok, dan pengelolaan risiko. Dengan menggunakan kerangka kerja yang tepat, organisasi dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan kebutuhan operasional mereka (Chopra & Meindl, 2021).

Allignment strategis dalam pengadaan

Teori ini menekankan pentingnya keselarasan antara strategi pengadaan dengan tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa keputusan pengadaan mendukung visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, manajemen strategis membantu dalam menciptakan sinergi antara berbagai fungsi dan departemen dalam organisasi (Simchi-Levi et al., 2019).

Pengukuran kinerja dalam pengadaan

Teori manajemen strategis menekankan pentingnya pengukuran kinerja dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi pengadaan. Ini melibatkan penggunaan indikator kinerja kunci (KPI) untuk mengukur prestasi dalam hal efisiensi operasional, kualitas produk atau layanan, dan kepuasan pelanggan (Hugos & Hultitzky, 2018).

Inovasi dalam pengadaan

Teori manajemen strategis mendorong organisasi untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam pengadaan barang dan jasa. Ini termasuk eksplorasi teknologi baru, metode pembelian alternatif, dan kemitraan strategis dengan pemasok. Dengan mengadopsi inovasi, organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam pengadaan.

Pengelolaan risiko dalam pengadaan

Teori manajemen strategis menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam pengadaan barang dan jasa. Ini melibatkan identifikasi risiko potensial, evaluasi dampaknya, dan pengembangan strategi mitigasi yang efektif. Dengan mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat mengurangi kemungkinan gangguan dalam rantai pasok dan memastikan kelancaran operasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Susanto (2017) manajemen pengadaan barang dan jasa sebagai faktor penting dalam meningkatkan daya saing nasional, dengan Indonesia sebagai studi kasus. Susanto mengidentifikasi beberapa masalah dalam pengadaan di Indonesia yang mempengaruhi daya saing negara, termasuk ketidaktransparanan, korupsi, lambatnya proses, dan kurangnya inovasi dalam sistem pengadaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan manajemen pengadaan, seperti pembentukan lembaga khusus seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan implementasi berbagai peraturan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Porter (1990) mengutarakan bahwa elemen-elemen yang memberikan keunggulan kompetitif pada tingkat nasional, dan bagaimana pengelolaan sumber daya, termasuk pengadaan barang dan jasa, memainkan peran kunci dalam meningkatkan daya saing. Daya saing global suatu negara, dan dapat memberikan perspektif yang berharga tentang area-area di mana Indonesia dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengadaan dan daya saing secara umum (Changalima et al, 2021). Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia (2019) memberikan wawasan mengenai strategi nasional dan perencanaan pembangunan, termasuk fokus pada pengadaan barang dan jasa sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional.

Susanto (2017) memberikan studi kasus tentang manajemen pengadaan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi daya saing nasional. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat dalam mendiskusikan strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, undang-undang, dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Analisis kebijakan pengadaan barang dan jasa ini penting untuk memahami kerangka kerja yang mengatur praktik pengadaan tersebut, termasuk persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Berikut adalah detail analisis kebijakan pengadaan barang dan jasa di Indonesia:

1. Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan regulasi utama yang mengatur pengadaan barang dan jasa di Indonesia. UU ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan yang Baik.
2. Peraturan Pemerintah
Pemerintah juga mengeluarkan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih rinci mengenai pengadaan barang dan jasa. Contohnya adalah PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Lembaga Pengadaan
Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman terkait pengadaan barang dan jasa. Misalnya, Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pedoman Teknis
Pedoman teknis juga dikeluarkan untuk memberikan panduan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pedoman ini mencakup prosedur-prosedur teknis, format dokumen, dan persyaratan administratif lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
5. Praktik Pengadaan di Tingkat Daerah
Selain regulasi nasional, setiap daerah di Indonesia juga memiliki peraturan dan pedoman sendiri terkait pengadaan barang dan jasa. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing daerah.

Implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan tahap penting dalam menjalankan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajemen yang efektif memastikan bahwa proses pengadaan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan standar, dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Dalam konteks Indonesia, implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat umum. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia:

1. Proses Pengadaan yang Terstruktur
Implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia dimulai dengan proses pengadaan yang terstruktur. Ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, pengumuman tender, evaluasi penawaran, hingga pemilihan pemenang tender. Setiap langkah dalam proses ini diatur oleh peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peran Pemangku Kepentingan

Implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa juga melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan pedoman yang jelas, serta memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelaku usaha dan pemasok juga memiliki peran dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta menyediakan barang dan jasa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dari implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Pemerintah melalui lembaga pengawasan seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, adil, dan efisien. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja penyedia barang dan jasa, serta untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan.

4. Penggunaan Teknologi Informasi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin mengandalkan penggunaan teknologi informasi. Sistem pengadaan elektronik (e-procurement) telah diperkenalkan untuk memfasilitasi proses pengadaan secara online, mulai dari pendaftaran peserta tender hingga pengumuman hasil evaluasi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi praktik korupsi dan kolusi, serta meningkatkan aksesibilitas bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.

5. Tantangan dan Hambatan

Meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, masih ada sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah korupsi dan praktik kolusi yang masih menjadi perhatian utama. Selain itu, kurangnya kapasitas SDM, ketidaktransparan dalam proses pengadaan, serta birokrasi yang kompleks juga menjadi hambatan dalam menjalankan pengadaan yang efektif dan efisien.

Implementasi terkait manajemen sumber daya selama proses pengadaan jasa penting diperhatikan dalam mengurangi kemungkinan dan dampak risiko (Arifin, 2020). Pentingnya pendekatan kolaboratif dalam manajemen risiko dengan penyedia layanan untuk mengelola gangguan layanan. Dengan demikian, implementasi manajemen risiko dapat mendukung proses pengadaan jasa (Harju et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak peluang telah diciptakan untuk mendorong pendekatan baru yang terintegrasi terhadap program berkelanjutan di banyak sektor, khususnya pendidikan. Peran penting yang dimainkan oleh negara dan kebijakan publik dalam transisi menuju sistem sumber daya yang lebih berkelanjutan dipertaruhkan dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah (Mahapatro, 2021). Mengingat hal ini, mengeksplorasi munculnya prosedur inovatif pengadaan publik di kantin sekolah negeri di Portugal. Setelah mempertimbangkan evolusi kerangka normatif Eropa dan Portugis terkait sintesis database Pemerintah mengenai pengadaan makanan sekolah oleh pemerintah, dan dua studi kasus yang berkaitan dengan dua wilayah berbeda di mana administrasi publik. Pengadaan dengan memperhatikan kriteria kualitatif dalam kontrak publik atas pengadaan barang dan jasa yang mempertimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan etika secara aktif mendorong penggunaan prosedur ramah lingkungan dan berkelanjutan di kantin sekolah negeri, realisasi efektif di lapangan masih belum merata (Bizarro & Ferreiro, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan data kualitatif dijabarkan sebagai berikut.

1. Wawancara Stakeholder: Melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memahami perspektif mereka tentang efektivitas kebijakan pengadaan barang dan jasa dan strategi pengembangannya.

Efektivitas e-procurement (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) di Kabupaten Bone oleh Jusniati et al., (2022) dijelaskan bahwa pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, serta tanggung jawab dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Bone ini sudah mencapai targetnya yaitu mampu memberikan layanan proses pengadaan dengan baik sehingga para penyedia dan pengguna juga mampu menggunakan barang dan jasa dengan baik.

2. Studi Kasus: Menganalisis studi kasus dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang sukses atau yang mengalami kendala. Data ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi strategi pengembangan sumber daya.

Proses pengadaan barang berupa alat pembelajaran teknologi informasi di SMKN 1 Nglipar hampir terpenuhi nilai yang diharapkan ketika diproses berdasarkan domain APO03 sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi pengembangan sumber daya barang yang diitnjau berdasarkan manajemen sudah berhasil (Irawan et al., 2022).

3. Analisis SWOT: Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Data ini membantu untuk merumuskan strategi pengembangan yang efektif.

Berdasarkan Analisis SWOT pada penelitian yang dilakukan oleh Bukit et al., (2022), yang dianalisis dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dapat disusun strategi SO (mengggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang, strategi ST (mengggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman), strategi WO (memperbaiki atau mengatasi kelemahan untuk mendapatkan peluang) dan Strategi WT (memperbaiki kelemahan untuk mengatasi ancaman. Dari keempat strategi ini memunculkan satu strategi utama yaitu metode pengadaan langsung dengan lebih transparan, akuntabel dan profesional, sehingga pada gilirannya metode pengadaan langsung ini menjadi lebih efisien, efektif dan optimal.

4. Analisis Literatur: Meninjau literatur terkait baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa yang relevan untuk meningkatkan daya saing.

Pelaksanaan pengadaan barang berupa e-book pada Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan tahun anggaran 2021 secara umum telah mengikuti petunjuk dan pedoman yang terdapat pada Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan LKPP 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Kalang, 2022).

Penelitian terdahulu yang mengulas terkait data kuantitatif pengembangan sumber daya barang dan jasa

1. Efisiensi Proses Pengadaan

Mengumpulkan data tentang waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa. Data ini dapat membantu untuk mengevaluasi efisiensi proses pengadaan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan.

Penerapan e-goverment terutama dalam bidang pendidikan dengan menggunakan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa pada proses pelaksanaannya menyederhanakan birokrasi yang rumit dan memudahkan pengadaan barang dan jasa untuk sekolah, sehingga pemenuhan kebutuhan sekolah lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Penelitian Moelyono & Rosmiyanti (2022) menyatakan bahwa di SMAN 1 Bandar Lampung pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan manajemen sumber daya yang ada.

2. Evaluasi Dampak Ekonomi

Mengumpulkan data tentang dampak ekonomi dari implementasi strategi pengembangan sumber daya pengadaan barang dan jasa. Ini mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pengadaan barang di dunia pendidikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebutkan dalam penelitian Hartati (2021) bahwa terdapat pengaruh signifikan terkait pengadaan barang di bidang pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penelitian tentang "Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Implementasi Manajemen"

memiliki beberapa implikasi yang signifikan, baik bagi praktisi, pengambil kebijakan, maupun akademisi.

1. Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Implikasinya adalah bahwa investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan SDM menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan.
2. Perlunya Revisi Kebijakan dan Pedoman: Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam kebijakan dan pedoman yang mengatur pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Implikasinya adalah perlunya revisi dan pembaruan kebijakan serta pedoman yang lebih baik untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Adopsi Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi, seperti e-procurement, diakui sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Implikasinya adalah bahwa pemerintah dan organisasi terkait perlu terus mengembangkan dan meningkatkan sistem e-procurement mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengadaan.
4. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta: Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam upaya meningkatkan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Implikasinya adalah bahwa terciptanya kemitraan yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga swasta lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan inovasi dalam pengadaan.
5. Perlunya Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap proses pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang tidak etis atau korup tidak terjadi. Implikasinya adalah bahwa lembaga pengawas, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perlu diberi mandat dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif.
6. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan: Penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi strategi pengembangan sumber daya dalam pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Implikasinya adalah bahwa dengan memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan, baik dari sisi keahlian teknis maupun manajerial, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pengadaan secara keseluruhan.
7. Transparansi dan Akuntabilitas: Melalui tinjauan terhadap kebijakan dan implementasi manajemen, penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Implikasinya adalah bahwa dengan menerapkan praktik pengadaan yang transparan dan akuntabel, dapat meminimalkan praktik korupsi dan kolusi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadaan.

Berdasarkan implikasi yang diidentifikasi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, lembaga pengawas, dan organisasi terkait:

1. Revisi Kebijakan dan Pedoman: Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pedoman yang ada, dan melakukan revisi sesuai dengan temuan dan rekomendasi dari penelitian ini. Revisi tersebut harus bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Pemerintah dan organisasi terkait perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan SDM yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Ini termasuk pengembangan keterampilan teknis, manajerial, dan etika yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik.
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir yang berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian teknis dan manajerial.
4. Perbaikan Kebijakan dan Prosedur: Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur pengadaan yang ada. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, serta memperbarui regulasi sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan pengguna.

5. Promosi Budaya Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan lembaga terkait harus terus mempromosikan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Ini meliputi penyediaan informasi yang mudah diakses kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang melanggar etika dan aturan yang berlaku.
6. Inovasi dalam Pengadaan: Diperlukan inovasi dalam praktik pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mendorong eksplorasi teknologi baru, metode pembelian alternatif, dan strategi kemitraan.

4. KESIMPULAN

Manajemen strategis memainkan peran kunci dalam mengarahkan pengadaan barang dan jasa ke arah yang lebih efektif dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep dari landasan teori yang telah disebutkan di atas, organisasi dapat mengembangkan strategi pengadaan yang sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam rangka meningkatkan implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Pemerintah perlu terus memperbaiki kebijakan dan pedoman yang ada, serta memastikan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat. Pelaku usaha juga harus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, implementasi manajemen dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mendukung pembangunan negara yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad, A. K. A., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85-92.
- Ahmed, R. R., Akbar, W., Aijaz, M., Channar, Z. A., Ahmed, F., & Parmar, V. (2023). The role of green innovation on environmental and organizational performance: Moderation of human resource practices and management commitment. *Heliyon*, 9(1).
- Alqudah, I. H., Carballo-Penela, A., & Ruzo-Sanmartín, E. (2022). High-performance human resource management practices and readiness for change: An integrative model including affective commitment, employees' performance, and the moderating role of hierarchy culture. *European Research on Management and Business Economics*, 28(1), 100177.
- Arifin, A. S. R. (2020). Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa di Perguruan Tinggi. *Cived*, 7(1), 36-43.
- Armstrong, M. (2012). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page Publishers.
- Changalima, I. A., Mushi, G. O., & Mwiseje, S. S. (2021). Procurement planning as a strategic tool for public procurement effectiveness: Experience from selected public procuring entities in Dodoma city, Tanzania. *Journal of Public Procurement*, 21(1), 37-52.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2021). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (8th ed.). Pearson.
- Greer, C. R. (2021). *Strategic human resource management*. Pearson Custom Publishing.
- Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2013). *Strategic Management: An Integrated Approach*. Cengage Learning.
- Hugos, M. H., & Hultzky, D. (2018). *Supply Chain Management For Dummies* (2nd ed.). Wiley.
- Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regnér, P. (2014). *Exploring Strategy: Text and Cases*. Pearson Education.
- Kalang, E. A. (2022). *Analisis atas Pengadaan E-Book pada Markas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kota Bandung Tahun Anggaran 2021* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Kuntadi, C., & Yuslina, R. (2023). Literature Review: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa: Perencanaan Anggaran, Komitmen Manajemen dan Sumber Daya

- Manusia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 469-478.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2020). *Panduan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Penerapan Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 54 Tahun 2010 Beserta Revisinya*. PT Elex Media Komputindo.
- Mahapatro, B. (2021). *Human resource management*. New Age International (P) ltd..
- Masudin, I., Aprilia, G. D., Nugraha, A., & Restuputri, D. P. (2021). Impact of E-procurement adoption on company performance: Evidence from Indonesian manufacturing industry. *Logistics*, 5(1), 16.
- Mousa, S. K., & Othman, M. (2020). The impact of green human resource management practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework. *Journal of cleaner production*, 243, 118595.
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33-50.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Porter, M. E. (1990). "The Competitive Advantage of Nations." *Harvard Business Review*, 68(2), 73-93.
- Pournader, M., Kach, A., & Talluri, S. (2020). A review of the existing and emerging topics in the supply chain risk management literature. *Decision sciences*, 51(4), 867-919.
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 1(1), 1-9.
- Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 21(2), 244-261.
- Sachs, J. D. (2017). "Global Competitiveness: Beyond Natural Resources." *Journal of Economic Perspectives*, 31(3), 239-256.
- Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2019). *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Susanto, A. B. (2017). "Procurement Management for National Competitiveness: A Case Study of Indonesia." *International Journal of Public Administration*, 40(8), 665-676.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Yunus, M. (2019). "Sustainable Procurement: A Catalyst for Economic Transformation." *Journal of Sustainable Development*, 22(4), 127-140.